

***Adaptive Governance* Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Mamuju**

Nurathirah Aprillah Norman^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Rulinawaty Kasmad³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine Adaptive Governance in Capacity Building of Local Governments in Empowering Street Vendors (PKL). This study used descriptive qualitative. This type of research was qualitative. Data sources consisted of Primary data and Secondary data. The number of informants in this study were 7 (seven) people from 6 (six) agencies. The results of this study indicated that Adaptive Governance in the Capacity Development of Local Governments in Street Vendors Empowerment (PKL) had been running well as evidenced by the development of street vendors no longer using public roads to trade. Although there was little that needed to be addressed so that street vendors were satisfied with the results of government work. The influencing factor was the government providing a new location for street vendors to trade and no longer using public roads that disturbed road users.

Keywords : *adaptive governance and street vendors (pkl)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tipe Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Jenis penelitian yaitu Kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 7 (tujuh) orang dari 6 (enam) Instansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah berjalan dengan baik terbukti dengan Perkembangan PKL tidak lagi menggunakan jalan umum untuk berdagang. Walaupun ada sedikit yang perlu dibenahi agar PKL merasa puas dengan hasil kerja pemerintah. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemerintah memberikan Lokasi baru untuk para PKL berdagang dan tidak lagi memakai jalan umum yang mengganggu pengguna jalan.

Kata Kunci : *adaptive governance dan pedagang kaki lima (pkl)*

* nurathirahan@gmail.com

PENDAHULUAN

Adaptive Governance melihat adanya saling ketergantungan terhadap praktek inovasi dalam ilmu pengetahuan kebijakan publik baik dalam perumusan kebijakan untuk mendesain struktur organisasi maupun implementasi kebijakan. Pemerintahan adaptif adalah konsep dari teori kelembagaan yang berkaitan dengan evolusi institusi untuk pengelolaan aset bersama (*Adaptive Governance* : mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan juga pengambilan keputusan, 2005). Pemerintahan Adaptif berkembang untuk menganalisis masalah-masalah sosial, kelembagaan, ekonomi, dan ekologi. Model ini telah berhasil membangun dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan dari perubahan global serba cepat.

Adaptive governance diharapkan agar mempercepat transisi dalam pengelolaan pemerintahan, agar masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dapat selesai dalam pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Oleh karena itu, *Adaptive Governance* akan merangkum kedalam pola Pemerintahan Adaptif yang lebih besar dan mendefinisikan kembali peran mereka untuk memfasilitasi dan memajukan

kepentingan bersama dalam kebijakan sumber daya alam, Memajukan kepentingan bersama, tujuan dan kriteria yang tepat untuk pemerintahan dalam pemberdayaan PKL. (*Adaptive Governance*: mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan juga pengambilan keputusan, 2005).

Adaptive Governance memiliki kebijakan sumber daya manusia Pemerintahan Adaptif dan telah memajukan kepentingan bersama dengan cukup baik untuk dipertimbangkan sebagai model “*innovation*”. Adaptif dapat mendorong pengelolaan dan penggunaan aset bersama yang efektif seperti sumber daya bersama dan aset lingkungan yang menyediakan lingkungan organisasi (Dodds et al, 2007). Di Indonesia Jumlah PKL tumbuh bagaikan cawan dimusim hujan, jumlah PKL di Indonesia mencapai 141 juta menurut catatan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Indonesia pada tahun 2018. Sedangkan jumlah PKL di Kabupaten Mamuju 110. Tetapi Peneliti Memfokuskan penelitian hanya di Anjungan Pantai Manakarra, dan yang telah di ketahui jumlah PKL di Anjungan Pantai Manakarra sebanyak 80 stand para Pedagang kaki lima. Pembuatan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2015, Pedagang Kaki Lima

adalah pelaku usaha yang telah melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana atau tempat usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan maupun bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Kemudian didukung Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Serta Pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Mamuju No 53 Tahun 2016, tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Semua Regulasi yang lahirkan belum mampu membuat Pemerintah dapat menangani masalah PKL yang menjadi masalah publik yang kompleks. Sementara Akuntabilitas kebijakan menunjukkan pemberdayaan PKL di Kabupaten Mamuju dirancang berdasarkan pendekatan top-down, sehingga dianggap sebagai objek, yang harus menerima semua program pemerintah yang ditujukan padanya. (Rulinawaty Kasmad, 2015) Kebijakan tersebut akan memberdayakan para PKL yang masih relatif miskin, sebagaimana dimaksud oleh (Hudson & Lowe, 2004) bahwa tujuan dari kebijakan publik untuk mengatasi masalah publik, seperti masalah kemiskinan di Indonesia. Namun

mereka juga perlu bertahan hidup termasuk dalam kehidupan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak seperti halnya PKL. Tetapi sumber masalah yang menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas jalan raya di semua kota besar di Indonesia, salah satunya karena adanya PKL. Dari pembahasan di atas Penelitian ini akan mengukur faktor yang mempengaruhi penelitian mencoba menggunakan teori *Capacity Building* menurut Model Grindle 1997 dan konsep *Adaptive Governance*.

Penelitian ini menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini mengangkat “*Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju.”

Adaptive Governance berfungsi untuk meningkatkan peran stret level birokrasi, regulasi, dan manajemen lainnya. Dengan dijalankannya *Adaptive Governance* dapat merangkum seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan sumber daya alam dan

organisasi. Pemerintahan adaptif mengacu ke Pemerintahan baru mendefinisikannya sebagai bentuk koordinasi sosial dimana tindakan dikoordinasikan secara sukarela oleh individu dan organisasi dengan kemampuan mengatur dan memperkuat diri sendiri. Pemerintahan Adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, lembaga, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi Folke et al (2005). Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif, fleksibel, berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem, juga disebut sebagai "pengelolaan bersama adaptif" Engle, N. L, (2011). Tinjauan ini berkonsentrasi pada pengalaman Pemerintahan Adaptif (*Adaptive Governance*) dari sistem sosial-ekologis selama periode perubahan mendadak/krisis dan menyelidiki sumber sosial pembaruan dan reorganisasi. Tata kelola semacam itu menghubungkan individu, organisasi, lembaga, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Sistem pemerintahan Adaptif sering mengatur diri sendiri sebagai jejaring sosial dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman dan kebijakan bersama.

Munculnya agar dapat menjembatani organisasi yang tampaknya menurunkan biaya kolaborasi dan resolusi konflik, dan legislasi yang memungkinkan adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung swasusun sambil membingkai kreativitas untuk upaya pengelolaan bersama yang adaptif.

Sistem sosial - ekologis yang tangguh dapat memanfaatkan krisis sebagai peluang untuk berubah menjadi negara yang lebih diinginkan. Dalam teori *Capacity Building* menurut Model Grindle 1997 dan konsep *Adaptive Governance* menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator sebagai berikut: (1) Pengembangan sumber daya manusia Adaptif. (2) Penguatan Organisasi Adaptif. (3) Pembaharuan institusional Pemerintahan Adaptif. Teori kontrak sosial yang baru membahas konsep “*social capital, norm, political culture*” (modal sosial, norma, budaya politik) mengisyaratkan bahwa adanya lembaga pemerintah yang efektif karena atribusi kolektifitas dan kekuasaan politik yang sangat membutuhkan kesamaan dengan empat norma kebenaran politis masyarakat seperti; Struktur kewenangan (*structure of authority*), Lingkup kewenangan (*scope of authority*), Letak kewenangan

(*location of authority*), dan Sumber kewenangan (*source of authority*), Kalt, dalam Grindle (1997). Dalam beberapa literatur pembangunannya itu menyebabkan konsep *capacity building* sebenarnya masih menyisahkan sedikit perdebatan-perdebatan yang ada dalam pendefinisian penting.

Sebagian para ilmuwan memaknai *capacity building* sebagai Pengembangan Kapasitas (*capacity development*) atau Penguatan Kapasitas (*capacity strengthening*), mengingatkan suatu prakarsa pengembangan kemampuan yang ada atau Kapasitas yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai kerja kreatif membangun kapasitas yang belum terlihat. Penulis tidak menjelaskan salah satu sisi karena keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni, analisa kapasitas sebagai alat inisiatif untuk meningkatkan *government performance*. Merilee S. Grindle (1997).

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yaitu suatu upaya yang telah membuat pengembangan dan sekaligus mengembangkan suatu ragam-ragam strategi yang meningkatkan *effisiensi, efektivitas, dan responsif* kinerja pemerintah. *Effisiensi*

dalam waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu *Efektivitas* berupa kepantasan usaha agar mendapat hasil yang diinginkan dan *Responsif* yakni bagaimana mensinkronkan antara keduanya yaitu, kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Pengembangan Kapasitas Menurut Grindlee (1997) sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable* (kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara Efektif, Efisien dan berkelanjutan). Pengembangan Kapasitas merupakan proses untuk melakukan suatu gerakan, perubahan multi level yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka memperkuat kemampuan individu dan organisasi agar mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Sebagai program yang banyak berhubungan langsung dengan proyek pembangunan negara Dunia Ketiga, Pengembangan Kapasitas (*capacity building*) ini telah menjadi bagian sangat penting dalam pembahasan lembaga internasional; *United Nations* yang memberi rujukan “*Capacity Building*” berdimensikan pada; (1) Mandat dan struktur legal, (2) Struktur kelembagaan, (3) Pendekatan manajerial, (4) Kemampuan organisasi

dan teknis, (5) Kemampuan fiskal lokal, dan (6) Aktivitas-aktivitas program. World Bank menekankan *capacity building* pada; a) Pengembangan SDM : Training, Rekrutmen, dan teknis. b) Penguatan Organisasi: Koordinasi, dan Aktifitas Organisasi. c) Pembaharuan institusional : fungsi network. Lingkungan organisasi meliputi aturan (*rule*) dan undang-undang (*legislation*) yang mengatur pelayanan publik, dan tanggung jawab.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah seringkali mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya-upaya agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan terkhusus kepada masyarakat. Sebagai kelanjutan upaya Pemberdayaan PKL dalam upaya memaksimalkan pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umum yang dilihat dari suatu pendapatan (*income*). Maka seringkali upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat bertumpu pada upaya-upaya peningkatan pendapatan para PKL. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis maka ada beberapa penelitian-penelitian yang dikutip dan sangat relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan dapat pula dijadikan contoh untuk melakukan penelitian.

Pengembangan Kapasitas adalah sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable* (kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara Efektif, Efisien dan berkelanjutan) Grindle, (1997). Pengembangan sumber daya Manusia dalam Pemerintahan Adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah di kelola pemerintah agar tetap diketahui Masyarakat meskipun di era Global yang semakin pesat Penguatan Organisasi pemerintahan Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multi level pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Pembaharuan institusional Adaptif adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara independensi komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan Pemerintah Adaptif, serta sistem bernegara, berorganisasi dan imparialitas Institutional. Ini menggabungkan konsep *Adaptive Governance* dengan *Capacity Building* sehingga lahirlah Organisasi Adaptif.

Konsep inilah yang akan digunakan untuk mengukur pemberdayaan Organisasi Adaptif dalam kebijakan Pemberdayaan PKL dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Adaptif yang terdiri dari, Pengembangan SDM Pemerintahan Adaptif, penguatan Organisasi Pemerintahan Adaptif, dan Reformasi Instutional pemerintahan Adaptif untuk mencari dalam Kinerja pemerintahan Adaptif.

METODE PENELITIAN

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah selama 2 bulan dari tanggal 22 Juni- 22 Agustus 2019. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju Pemilihan Kabupaten Mamuju, karena di Mamuju terdapat kebijakan pemerintah dalam memperdayakan PKL. Jenis penelitian yang dimaksud yaitu penelitian Kualitatif dimana penelitian yang menggunakan suatu prosedur penelitian dengan menggambarkan data yang berupa tulisan serta mengamati perilaku orang yang diamati (Bogdan, 1992:21). Penelitian Kualitatif akan menggambarkan hasil penelitian dalam penyelenggaraan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tipe penelitian ini adalah Deskriptif

Kualitatif, adalah mendeskripsikan kenyataan suatu pokok masalah yang diselidiki serta diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat serta penelitian ini mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang berbentuk kata, skema dan gambar yang memiliki masalah *Performance Basec Bureaucracy* pada aparatur sipil Negara (Sugiyono, 2003:14). Deskriptif kualitatif ini mencoba menggambarkan apa yang terjadi dalam penelitian pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Informan yang peneliti wawancarai berjumlah 7 orang. Teknik Pengumpulan data antara lain yaitu, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adaptive Governance merupakan istilah yang telah digunakan untuk menggambarkan suatu proses pembelajaran melalui pemantauan ekosistem ke tindakan tertentu, diikuti oleh perubahan yang meningkat dalam tindakan berdasarkan apa yang telah dipelajari. *Adaptive Governance* berfungsi untuk meningkatkan peran stret level birokrasi, regulasi, dan manajemen lainnya. Dengan

dijalankannya *Adaptive Governance* dapat merangkul seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan sumber daya alam dan organisasi. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yaitu suatu upaya yang telah membuat pengembangan dan sekaligus mengembangkan suatu ragam - ragam strategi yang meningkatkan *effisiensi, efektivitas, dan responsif* kinerja pemerintah. *Effisiensi* dalam waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu *Efektivitas* berupa kepastian usaha agar mendapat hasil yang diinginkan dan *Responsif* yakni bagaimana mensinkronkan antara keduanya yaitu, kebutuhan dan kemampuan.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni penelitian model atau strategi adaptasi pemberdayaan PKL menjadi pedagang merupakan penelitian lanjutan. Trisni-Utami dkk (2006) meneliti model pemberdayaan PKL melalui kerjasama antar stake holder. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup para PKL. Sebagai kelanjutan upaya untuk pemberdayaan PKL, penelitian ini akan segera mengevaluasi

dan berupaya agar mendapatkan model atau strategi adaptasi komunitas PKL dan dapat menjadi pedagang pasar agar komunitas tersebut menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan PKL dalam upaya memaksimalkan pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umum yang dilihat dari suatu pendapatan (*income*). Pendekatan permasalahan kemiskinan dari semua segi peningkatan pendapatan (*income*) saja tidak mampu untuk memecahkan sebuah permasalahan para PKL karena, yang ada dalam pemberdayaan PKL bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju, konsep yang digunakan untuk mengatur pemberdayaan organisasi adaptif dalam kebijakan pemberdayaan PKL dalam pengembangan Kapasitas pemerintahan adaptif yang terdiri dari, (1) Pengembangan SDM Pemerintahan Adaptif, (2) Penguatan Organisasi Pemerintah Adaptif, dan (3) Reformasi Instutional Pemerintah Adaptif untuk mencari dalam Kinerja Pemerintahan Adaptif.

Hasil pengkajian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut: Sumber daya Manusia (SDM) merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan (Mathis dan Jackson 2006). Senada dengan itu Pengembangan sumber daya Manusia dalam Pemerintahan Adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah di kelola pemerintah agar tetap diketahui Pegawai dan Masyarakat meskipun diera Global yang semakin pesat.

Upaya ini dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan kemampuan

yang telah dimiliki Pegawai agar dapat mengembangkan keterampilan manajemen, skill pelayanan dan kebijakan esensial yang sangat dibutuhkan dan juga dapat membangun struktur budaya, sosial politik, dan ekonomi Negara. Sumber daya Manusia sangat penting karena memiliki proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Sumber Daya Manusia ilmu untuk mengatur hubungan dan peran tenaga kerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utama Pemerintah.

Tabel. 4.3 Reduksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Adaptif

No	INFORMAN	SUB.INDIKATOR		
		Training	Rekrutmen	Teknis
1	Dinas Perdagangan	Tupoksi kinerja	Jalur ASN	Relokasi yaitu penempatan Baru para PKL
2	Dinas Perhubungan	Diklat	Jalur ASN	Relokasi
3	Dinas Kebersihan	Diklat	Jalur ASN	Relokasi
4	Satpol PP	Pelatihan	Jalur ASN	Relokasi
5	Lurah Binanga	Tidak ada	Jalur ASN	Tidak ada
6	PKL	Pelatihan	Mendaftar dikantor Dinas Perdagangan	Tidak ada

Sumber : Wawancara dengan 7 orang dari 6 Instansi, 2019.

Dari tabel diatas penelitian menunjukkan pengembangan Sumber daya Manusia dilihat dalam Training sebagian besar melakukan Diklat begitupun dengan Rekrutmen sebagian besar melalui Jalur ASN dan Teknis melakukan Relokasi. Dalam teori Grinddle Pengembangan sumber daya manusia dalam Pemerintahan Adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah di kelola pemerintah agar tetap diketahui dan dirasakan Masyarakat meskipun diera Global yang semakin pesat. Hal ini bisa diliat dari wawancara: a) Training Mengenai Training yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut :

“Ya, kalau Training selalu dilakukan baik itu untuk pelayanan, dan untuk Tupoksi Kinerja, untuk peningkatan skill para pegawai dikantor dan kemudian bagaimana pelaksanaan Good Governance” selain Tupoksi Kinerja Training yang sering dilakukan juga yaitu diklat dan pelatihan untuk para pegawai”. (Wawancara dengan Bapak TS, 1 Juli 2019). Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa: *“Training dikantor ini sering dilakukan,*

setiap pegawai itu semua telah diikuti pelatihan maupun diklat dan berbeda-beda. Kami sering mengadakan pelatihan agar dapat meningkatkan skill para pegawai dengan begitu juga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat”. (Wawancara dengan Bapak OT, 4 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dikantor Dinas perdagangan itu sudah diadakan Training dalam hal peningkatan skill kinerja para pegawai. Training yang sering dilakukan yaitu Diklat dan Pelatihan. Dimana pemerintah berusaha agar para pegawai memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di era globalisasi. Mengenai Rekrutmen yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut: *“Untuk para pegawai itu melalui jalur ASN. Semua Intansi yang bekerjasama juga melalui Jalur ASN. Jadi tidak ada Jalur-jalur yang dapat dilalui dikantor ini kecuali jalur ASN karena data para pegawai dari pusat dan akan semakin bertambah dari tahun ketahun. Apalagi Dinas Perdagangan ini baru terbentuk 2016 lalu jadi pemerintah banyak yang memutasi pegawai untuk kekantor ini”*

(Wawancara dengan Bapak TS, 1 Juli 2019). Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa: *“Pegawai dikantor inisemua melalui jalur Pemerintah, Istandisi lain juga semua rata-rata pegawainya itu ASN. Jadi kalau persoalan rekrutmen pegawai tidak ada, karena pegawai disini rata-rata ASN semua data pegawai diakses pemerintah pusat”*. (Wawancara dengan Bapak OT, 4 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perekrutan pegawai pada kantor Dinas perdagangan hanya melalui jalur ASN dan tidak dapat melalui jalur-jalur lain. Sehingga dalam hal rekrutmen sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui pendaftaran yang di buka pemerintah. Mengenai Teknis yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut: *“Karena PKL itu sering sekali menimbulkan masalah, contohnya saja masalah pada tempat berdagangan yang sembarangan itu sangat mengganggu pengguna jalan dan membuat jalan macet. Maka dari itu Teknis yang dilakukan adalah Relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru. Kami menempatkan para*

PKL di lokasi baru untuk mempermudah kami dalam hal mengatur dan juga memberikan lahan-lahan para PKL untuk berdagang”. (Wawancara dengan Bapak TS, 1 Juli 2019). Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa: *“Relokasi, yaitu PKL mendapatkan lokasi baru. Dengan menggunakan teknis Relokasi Kami dengan mudah juga menempatkan para PKL di lokasi baru dan membagikan lahan untuk pembangunan stand PKL. Apalagi tempat yang baru ini juga lumayan besar dan kami rasa sangat cocok untuk tempat berdagangnya para PKL”*. (Wawancara dengan Bapak OT, 4 Juli 2019).Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa teknis yang dilakukan Dinas Perdagangan yaitu melakukan Relokasi. Sesuai Perda No. 5 Tahun 2011 tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka pemerintah merencanakan relokasi bagi pedagang kaki lima di seputaran trotoar dan terkhusus untuk pedagang es kelapa sudah di sediakan lokasi baru disepanjang jalan Anjungan Pantai Manakarra. Karena rencana Penataan Anjungan Pantai Manakarra sebagai salah satu tempat strategis bagi masyarakat dan tempat berkumpul untuk sekedar bersantai dan

menyediakan aneka makanan, minuman, jajanan, serta permainan anak-anak. Penguatan Organisasi pemerintahan Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multi level pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Namun demikian, perkembangan dalam pengembangan tata kelola yang baik (*good governance*) bisa saja diadaptasi untuk menyusun organisasi pemerintahan. Misalnya, diperlukan

cara pengorganisasian yang lebih fleksibel, dibentuk tatanan yang memberikan *check and balances*, selalu dibuka kemungkinan mekanisme umpan balik yang efektif dan sebagainya.

Tabel. 4.4 Reduksi Penguatan Organisasi Pemerintahan Adaptif

NO	INFORMAN	SUB. INDIKATOR	
		Koordinasi	Aktifitas Organisasi
1	Dinas Perdagangan	Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Lurah dan PKL	Relokasi, Memantau PKL, Bekerjasama dengan Instansi
2	Dinas Perhubungan	Dinas Perdagangan	Memantau Perparkiran pelanggan PKL
3	Dinas Kebersihan	Dinas Perdagangan	Memantau Kebersihan Para PKL
4	Satpol PP	Dinas Perdagangan	Mengatur stand PKL
5	Lurah Binanga	Dinas Perdagangan	Mengontrol PKL
6	PKL	Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, dan Lurah	Berdagang

Sumber: Wawancara dengan 7 orang dari 6 Instansi, 2019.

Dari tabel diatas penelitian menunjukkan Penguatan Organisasi Pemerintahan Adaptif dilihat dalam Koordinasi sebagian besar Instansi melakukannya dengan Dinas Perdagangan. Dan dilihat dari Aktifitas Organisasi itu berbeda-beda di setiap instansi. Aktifitas Organisasi Dinas Perdagangan yaitu Relokasi, Memantau PKL dan tetap menjalin Koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan PKL. Aktifitas Organisasi Dinas Perhubungan yaitu memantau tempat parkir pelanggan PKL. Aktifitas Organisasi Dinas Kebersihan yaitu memantau kebersihan para PKL. Aktifitas Organisasi Satpol PP yaitu Mengatur stand Para PKL. Aktifitas Organisasi Kelurahan Binanga yaitu memantau PKL dan aktifitas Organisasi PKL yaitu berdagang dan mengikuti aturan yang telah disepakati. Dalam teori Grindlee mengatakan bahwa Penguatan Organisasi pemerintahan Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multi level pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari wawancara : a) Koordinasi, Mengenai

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut :*“Aktifitas yang dilakukan dikantor Dinas Perdagangan yaitu Relokasi, Memantau PKL, Bekerjasama dengan Instansi. Dan juga setiap instansi itu berbeda-beda untuk hal Aktifitas organisasinya. Kelurahan itu memantau setiap bulan PKL, Dinas kebersihan memantau kebersihan lingkungan dan tempat berdagang, Satpol PP mengatur stand, dan dinas Perhubungan mengatur tempat parkir para PKL agar tersusun rapi dan tidak membuat macet jalanan. Untuk PKL sendiri yah berdagang dan mengikuti aturan yang telah di beritahukan dan sudah disetujui”*. (Wawancara bersama Bapak TS, 1 Juli 2019). Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa:*“Aktifitas yaitu bekerjasama dengan instansi, dan memantau PKL. Instansi yang bekerjasama sama dengan Dinas Perdagangan memiliki aktifitas yang berbeda-beda. Semua tergantung juga dengan pekerjaan masing-masing”*. (Wawancara bersama Bapak OT, 04 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa Dinas

Perdagangan melakukan Aktifitas Organisasi

Dinas Perdagangan yaitu Relokasi, Memantau PKL dan tetap menjalin Koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan PKL. Aktifitas Organisasi Dinas Perhubungan yaitu memantau tempat parkir pelanggan PKL. Aktifitas Organisasi Dinas Kebersihan yaitu memantau kebersihan para PKL. Aktifitas Organisasi Satpol PP yaitu Mengatur stand Para PKL. Aktifitas Organisasi Kelurahan Binanga yaitu memantau PKL dan aktifitas Organisasi PKL yaitu berdagang dan mengikuti aturan yang telah di setujui. Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan melakukan Aktifitas Organisasi Dinas Perdagangan yaitu Relokasi, Memantau PKL dan tetap menjalin Koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan PKL. Aktifitas Organisasi Dinas Perhubungan yaitu memantau tempat parkir pelanggan PKL. Aktifitas Organisasi Dinas Kebersihan yaitu memantau kebersihan para PKL. Aktifitas Organisasi Satpol PP yaitu Mengatur stand Para PKL. Aktifitas

Organisasi Kelurahan Binanga yaitu memantau PKL dan aktifitas Organisasi PKL yaitu berdagang dan mengikuti aturan yang telah di setujui.

Pembaharuan instutional Adaptif adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara independensi komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan Pemerintah Adaptif, serta sistem bernegara, berorganisasi dan imparialitas Instutional. Ini menggabungkan konsep *Adaptive Governance* dengan *Capacity Building* sehingga lahir Organisasi Adaptif. Konsep inilah yang akan digunakan untuk mengukur pemberdayaan Organisasi Adaptif dalam kebijakan Pemberdayaan PKL dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Adaptif yang terdiri dari, Pengembangan SDM Pemerintahan Adaptif, penguatan Organisasi Pemerintahan Adaptif, dan Reformasi Instutional pemerintahan Adaptif untuk mencari dalam Kinerja pemerintahan Adaptif.

Tabel. 4.5 Reduksi Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif

NO	INFORMAN	SUB.INDIKATOR
		Fungsi Network
1	Dinas Perdagangan	Mempermudah sharing file, membantu penyebaran informasi, dan menyimpan data secara aman.
2	Dinas Perhubungan	Mempermudah pekerjaan kantor
3	Dinas Kebersihan	Mempermudah Pekerjaan kantor
4	Satpol PP	Cepat menemukan data
5	Lurah Binanga	Mempermudah pekerjaan kantor
6	PKL	Tidak ada

Sumber : Wawancara dengan 7 orang dari 6 Instansi, 2019.

Fungsi Network, Mengenai Fungsi Network yang ada pada kantor Dinas Perdagangan berikut hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut :*“Seiring berkembangnya jaman yang semakin Modern dan membuat teknologi semakin di butuhkan. Salah satunya adalah teknologi komputer, sudah banyak sekali orang di dunia yang menggunakan komputer untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini Sangat membantu kami apalagi di era Globalisasi yang semakin canggih. Kalau menyebutkan fungsi network pasti banyak, tapi mungkin yang saya sebutkan yang penting contohnya fungsi Network/Komputer dikantor lebih mempermudah pegawai bekerja, mudah mendapatkan data, dan tempat aman untuk menyimpan data-data penting kantor. Tanpa adanya Komputer*

mungkin sangat sulit para pegawai bekerja.”(Wawancara bersama Bapak TS, 1 Juli 2019). Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa : “Kalau menyebutkan fungsi network pasti banyak, tapi mungkin yang saya sebutkan yang penting contohnya fungsi Network/Komputer dikantor lebih mempermudah pegawai bekerja, mudah mendapatkan data, dan tempat aman untuk menyimpan data-data penting kantor. Tanpa adanya Komputer mungkin sangat sulit para pegawai bekerja”. (Wawancara bersama Bapak OT, 04 Juli 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa sebagian besar fungsi Network Mempermudah Pekerjaan, mudah mendapatkan data, dan tempat aman untuk menyimpan data-data penting kantor. Tanpa adanya Komputer membuat pekerjaan menjadi sangat sulit

dikerjakan bagi para pegawai untuk bekerja.

KESIMPULAN

Penelitian yang Mengenai *Adaptive Governance* dalam pengembangan Kapasitas Pemerintahan daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju, maka berdasarkan Peran pemerintah dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam mengukur faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan teori *Capacity Building* menurut Model Grindlee 1997 dan konsep *Adaptive Governance* Yaitu: (1) Pengembangan Sumber daya Manusia Pemerintahan Adaptif dilihat dalam Training sebagian besar melakukan Diklat begitupun dengan Rekrutmen sebagian besar melalui Jalur ASN dan Teknis melakukan Relokasi. (2) Penguatan Organisasi Pemerintahan Adaptif dilihat dalam Koordinasi sebagian besar Instansi melakukannya dengan Dinas Perdagangan. Dan dilihat dari Aktifitas Organisasi itu berbeda-beda di setiap instansi. Aktifitas Organisasi Dinas Perdagangan yaitu Relokasi, Memantau PKL dan tetap menjalin Koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan PKL (3) Pembaharuan Institusional

Pemerintahan Adaptif dapat diliat Sebagian besar fungsi Network Mempermudah Pekerjaan, mudah mendapatkan data, dan tempat aman untuk menyimpan data-data penting kantor. Tanpa adanya Komputer membuat pekerjaan menjadi sangat sulit dikerjakan bagi para pegawai untuk bekerja. Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “*Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju” ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat melaksanakan peran pemerintah terhadap PKL sehingga berjalan dengan semestinya. Adapun saran-saran sebagai berikut yaitu: (1) Selain gerobak dan payung yang telah diberikan Diharapkan Pemerintah dapat memberikan tambahan bantuan fasilitas umum berupa kursi seragam untuk berjualan para PKL. Agar sepanjang jalan Anjungan pantai manakarra tempat para PKL berdagang terlihat rapi, bersih dan indah dipandang. (2) Diharapkan Pemerintah lebih sering melakukan Pembinaan terhadap para PKL berupa sosialisasi kewirausahaan atau pelatihan-pelatihan tentang PKL. (3) Para PKL seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar terciptanya keindahan dan

menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak. Pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk para PKL yang belum membuat surat izin usaha agar segera membuat secepatnya, jika tidak Para PKL akan mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Fischhendler, I., & Heikkila, T. (2007, November). *IWRM mendukung tata kelola adaptif: Suatu perspektif kebijakan. Dalam konferensi akhir Freude am Fluss*, Universitas Radboud, Nijmegen (NL) (pp. 22-24).
- Hatfield-Dodds, dkk. (2007). *Pemerintahan adaptif: Pengantar dan implikasi untuk kebijakan publik*. (No. 418-2016-26492).
- Kasmad, R., & Alwi, A. (2015). *Model Demokratis Akuntabilitas Kebijakan Publik. Studi Kasus tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(2), 186-202.
- C, Folke, dkk. (2005). *Tata kelola adaptif dari sistem sosial-ekologis*. *Annu. Rev. Environ. Sumber daya*, 30, 441-473.
- Engle, N. L. (2011). *Kapasitas adaptif dan penilaiannya*. *Perubahan lingkungan global*, 21(2), 647-656.
- Utami, T. (2014). *Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 25(2).
- Suharto, E. (2008). *Pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin: Konsep dan strategi*. *Jurnal studi Pemerintahan*.
- Farmer, E., & Weston, K. M. (2002). *Model konseptual untuk pengembangan kapasitas dalam penelitian perawatan kesehatan primer Australia*. *Dokter keluarga Australia*, 31(12), 1139.
- Engle, N. L. (2011). *Kapasitas adaptif dan penilaiannya*. *Perubahan lingkungan global*, 21(2), 647-656.
- James, V. U. (Ed.). (1998). *Pengembangan kapasitas di negara berkembang: Dimensi manusia dan lingkungan*. Grup Penerbitan Greenwood.
- Hilderbrand, dkk. (1997). *Mendapatkan pemerintahan yang baik: peningkatan kapasitas di sektor publik di negara berkembang*, 504.